

ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA (PROYEKSI DALAM MENGHADAPI COVID 19)

Ika Kurnia Indriani¹⁾

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

email: ikakurniaindriani@gmail.com

Abstrak

Kondisi keuangan pemerintah menjadi indikator penilaian kemampuan anggaran daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi untuk mewujudkan tujuan negara. Pandemi covid 19 membawa dampak besar kepada kondisi keuangan daerah. Penurunan jumlah pendapatan dan peningkatan jumlah belanja terjadi pada masa pandemi. Kondisi keuangan daerah yang baik akan berdampak kepada kemampuan daerah dalam menghadapi pandemi di wilayahnya. Daerah perkotaan menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran virus covid 19. Oleh karena itu, analisis kondisi keuangan bertujuan untuk memberikan proyeksi kemampuan pemerintah kota dalam masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota di Indonesia memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dalam menghadapi pandemi covid 19. Kondisi keuangan terbaik tahun 2014-2019 adalah pemerintah kota Palu, Balikpapan, Tarakan, Pontianak, Bima, Denpasar, Bontang, dan Ternate. Diproyeksikan pemerintah kota tersebut memiliki kapasitas anggaran terbaik dalam menghadapi pandemi covid 19.

Kata kunci: Covid 19, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, dan Pemerintah Kota

Abstract

financial condition of local government is an indicator for assessing the ability of regional budgets to face economic challenges to realize the national objectives. The COVID-19 pandemic has had a major impact on regional financial conditions. the local revenue will be decrease and the local expenditure will be increase in occurred during the pandemic. The best financial condition of local government will have an impact on the region's ability to deal with a pandemic. City areas are vulnerable to the spread of the covid 19 virus. Therefore, the analysis of financial conditions aims to provide a projection of the local government ability during the covid 19 pandemic. This study uses a descriptive quantitative approach, with indicators of budget solvency, financial independence, and service level solvency. The results has shown that local government in Indonesia have fairly good financial conditions in dealing with the covid 19 pandemic. The best financial conditions in 2014-2019 were the municipal governments of Palu, Balikpapan, Tarakan, Pontianak, Bima, Denpasar, Bontang, and Ternate. It is projected that the city government has the best budget capacity in dealing with the COVID-19 pandemic.

Key Words: Covid 19, Budgetary Solvency, Financial Independence, Service-Level Solvency, and Municipal Governments.

1. PENDAHULUAN

Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dilandasi oleh tujuan negara. Kondisi keuangan pemerintah daerah adalah efek keuangan yang diakibatkan oleh kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terdiri

atas empat hal utama, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk sebuah tatanan dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial (Republik Indonesia, 2002).

Mewujudkan tujuan negara harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pencapaian tujuan negara dilaksanakan atas kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakannya sendiri untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia, 2004).

Pelaksanaan program kerja pemerintah daerah mengacu kepada rencana kerja nasional. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan rencana strategi pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang program sesuai dengan kondisi daerahnya. Program dan kegiatan ini berdasarkan partisipasi masyarakat dan stakeholder baik secara ekonomi dan politik. Pelaksanaan program dan kegiatan didanai oleh anggaran pemerintah daerah. Realisasi program kegiatan berdampak kepada kondisi keuangan pemerintah daerah yang bervariasi pada masing-masing wilayah di Indonesia. Kondisi keuangan pemerintah daerah adalah dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara (Ritonga, 2014).

Kondisi keuangan yang sehat akan terjadi bila pemerintah daerah mampu melaksanakan hak-hak keuangan secara efisien dan efektif, sekaligus mampu memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Penilaian kondisi keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis kepada tiga indikator utama. Pertama, kemampuan untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan asli daerah (Ritonga, 2014). Kedua, kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional (Ritonga, 2014). Ketiga, kapasitas pemerintah daerah untuk memasok layanan

dengan standar dan kualitas yang di perlukan yang diminta oleh masyarakat (Ritonga, 2014). Selain itu, kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik terjadi bila pemerintah daerah mampu mengantisipasi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi dimasa depan seperti bencana alam, pandemi, perubahan iklim dan bencana sosial.

Pandemi covid 19 adalah peristiwa tidak terduga yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi covid 19 menyebabkan situasi yang tidak terduga sehingga pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan mengalokasikan anggaran negara untuk penanganan covid 19 (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Pandemi covid 19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah karena berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Jumlah kasus konfirmasi covid 19 di Indonesia tertinggi adalah wilayah perkotaan (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Hal ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang tinggi, jumlah penduduk yang besar, dan luas wilayah yang kecil (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Sayangnya, pemerintah kota merupakan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pusat bisnis. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keuangan pemerintah kota.

Penilaian kondisi keuangan daerah akan menilai bagaimana kapasitas anggaran pemerintah kota dari indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Fokus utama akan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal terhadap kemampuan daerah dalam menangani kasus covid 19 yang terjadi. Pandemi covid 19 merupakan kejadian tidak terduga yang berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat hingga mempengaruhi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional berada pada minus 2,1 persen pada tahun 2020, merupakan yang terendah sejak krisis ekonomi asia 1997-1998 (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi berdampak kepada penurunan pendapatan pemerintah dari sektor pajak

(Nugroho & Muhyiddin, 2021). Anggaran pemerintah direalokasi untuk penanganan pandemi yang diperoleh dari anggaran non prioritas dan belanja modal (Hasibuan, Dermawan, Ginting, & Muda, 2020). Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat covid 19 termasuk kebutuhan program dan pelayanan publik, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi keuangan daerah khususnya sebagai proyeksi menghadapi kejadian tidak terduga seperti pandemi covid 19. Negara di kawasan ASEAN menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah belum sepenuhnya dialokasikan kepada pelayanan publik utama seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (VEPR, Oxfam in Vietnam, The PRAKARSA, & TAFJA, 2020). Dimasa pandemi covid 19 akan terjadi peningkatan pelayanan kesehatan. Kondisi ini akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah belanja daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung (Sulistyo, 2018)

Pandemi covid 19 akan berdampak kepada kapasitas fiskal daerah akibat penurunan jumlah pendapatan daerah dan meningkatnya jumlah belanja daerah. Pandemi menyebabkan gangguan pada ekonomi daerah dan membuat tekanan besar pada fiskal daerah dalam jangka pendek (Green & Loualiche, 2020). Penilaian kondisi keuangan pada penelitian ini difokuskan kepada indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan dalam menghadapi pandemi covid 19. Pemerintah daerah melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi covid 19 (OECD, 2020). Pemerintah daerah belum melaksanakan penanganan pandemi secara menyeluruh dan jangka panjang (OECD, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah kota khususnya sebagai proyeksi dalam menghadapi pandemi covid 19.

2. KAJIAN LITERATUR SOLVABILITAS ANGGARAN

Penilaian indikator solvabilitas anggaran ditujukan untuk menilai keseimbangan antara pendapatan rutin dan pengeluaran operasional pemerintah daerah selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014). Penilaian indikator solvabilitas anggaran akan menekankan kepada pendapatan dana alokasi khusus (DAK) sebagai pendapatan rutin. Hal ini disebabkan oleh jumlah pendapatan DAK tidak dapat dipastikan karena merupakan keputusan pemerintah pusat (Ritonga, 2014).

Penghitungan solvabilitas anggaran akan membandingkan pendapatan DAK dengan seluruh belanja daerah. Solvabilitas anggaran akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi pendanaan operasionalnya selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014). Hasil perhitungan rasio solvabilitas anggaran semakin tinggi maka mengindikasikan semakin banyaknya pendapatan daerah yang tersedia untuk membiayai biaya operasional pemerintah daerah. Indikator ini dihitung dengan empat rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Belanja Operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Belanja Pegawai})}$$
$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio D = $\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$ KEMANDIRIAN KEUANGAN

Kemandirian keuangan adalah kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendapatan diluar kendalinya baik dari sumber dana nasional maupun internasional (Ritonga, 2014). Penilaian atas kemandirian keuangan akan menghasilkan sebuah informasi tentang bagaimana kekuatan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan segala program kerja yang telah direncanakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber

ekonomi yang dimilikinya (Ritonga, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola sumber pendapatan asli daerah dan mengembangkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan indikator kemandirian keuangan akan disimbolkan dengan nilai-nilai rasio yang semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah. Penilaian kemandirian keuangan dilakukan dengan dua rumus rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \quad \text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \quad \text{SOLVABILITAS}$$

LAYANAN

Solvabilitas layanan merupakan salah satu indikator penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah yang menilai kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat Wang et al, dalam (Ritonga, 2014). Penilaian kondisi keuangan atas solvabilitas layanan akan membandingkan jumlah penduduk dengan total belanja dan total belanja modal. Nilai total belanja dan belanja modal merupakan representasi dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam mewujudkan program kerja selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014). Selain itu, belanja modal merupakan pengeluaran yang memiliki dampak jangka panjang bagi daerah dan masyarakat. Penilaian solvabilitas layanan menggunakan rumus rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Penduduk}} \quad \text{Rasio F} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Penduduk}}$$

Perhitungan solvabilitas layanan akan dilakukan dengan total belanja. Tujuannya untuk merefleksikan seberapa besar anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan belanja modal sangat kuat hubungannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada peningkatan pelayanan publik. Perhitungan solvabilitas layanan difokuskan kepada perbandingan antara total belanja terhadap total

penduduk dan total belanja modal terhadap total penduduk. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan akan menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah (Ritonga, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini didasari oleh teori penilaian kondisi keuangan adalah teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945. Teknik penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah dikembangkan guna membantu daerah dalam menilai dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara (Ritonga, 2014). Penilaian kondisi keuangan disusun dalam enam indikator meliputi: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan (Ritonga, 2014).

Pada penelitian ini fokus penilaian kondisi keuangan terdapat pada indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau Laporan Realisasi APBD.
2. Pandemi covid 19 merupakan peristiwa yang baru terjadi pada tahun 2020 hingga saat penelitian ini disusun pada tahun 2021.
3. Penangan pandemi covid 19 di pemerintah daerah relatif menggunakan strategi jangka pendek pada jangka waktu kasus pertama hingga penelitian ini selesai dilakukan 1 September 2021.
4. Indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan merupakan teknik yang efektif menggambarkan kondisi keuangan daerah dalam jangka pendek. Khususnya keuangan daerah dalam menangani kasus covid 19 dalam jangka pendek. Mayoritas pemerintah daerah didunia masih melakukan penanganan covid 19 dengan strategi jangka pendek (OECD, 2020).

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang mungkin diperoleh melalui hasil perhitungan dan pengukuran yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif (Sugiyono, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kota di Indonesia. Jumlah pemerintah kota di seluruh wilayah Indonesia mencapai 95.

b. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). pemilihan Sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal ini dikarenakan tidak semua pemerintah kota di Indonesia mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran dalam periode 2014-2019. Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah pemerintah kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jumlah sampel sebanyak 30 pemerintah kota yaitu Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, Samarinda, Bontang, Balikpapan, Tarakan, Denpasar, Bima, Mataram, Kupang, Gorontalo, Makassar, Palopo, Pare-Pare, Palu, Bau-Bau, Kendari, Bitung, Mobagu, Manado, Tomohon, Ambon, Tual, Ternate, Tidore, Jayapura, dan Sorong.

c. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2014-2019. Data ini diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dengan mengakses laman portal data Direktorat

Jendral Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) dan laman BPK RI (https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan).

e. Teknik Analisis

Teknik analisis data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, penghitungan rasio indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan dan analisis statistik dengan aplikasi SPSS 28. Kedua, penghitungan indeks indikator. Ketiga, perhitungan indeks dimensi. Penilaian kondisi keuangan dilakukan dengan membandingkan/benchmark terhadap masing-masing sample penelitian.

Perhitungan indeks akan menghasilkan bobot dan peringkat atas kondisi keuangan pemerintah daerah. Indeks indikator adalah teknik yang digunakan untuk mentransformasi data agar nilai yang dihasilkan menjadi wajar untuk dianalisis (Ritonga, 2014). Indeks dimensi adalah teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh bobot masing-masing indeks indikator sesuai dengan rata-rata geometri dalam aritmatika sehingga akan menghasilkan nilai 0 dan 1 (Ritonga, 2014). Perhitungan indeks dimensi teknik ini mengasumsikan bahwa bobot masing-masing indeks indikator adalah sama. Formula menghitung indeks dimensi sebagai berikut:

$$\frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

Indeks Indikator =

Sumber: (Ritonga 2014:111)

$$\text{Indeks dimensi} = (\text{Indikator-1} + \text{Indikator-1} + \text{Indikator-1} + \dots + \text{Indikator-1})$$

Sumber: (Ritonga 2014:112)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN A. KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA

Penilaian kondisi keuangan pemerintah kota di Indonesia terhadap indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Analisis statistik deskriptif indikator solvabilitas anggaran pemerintah kota di Indonesia menunjukkan nilai skewness dan nilai kurtosis melebihi 0. Analisis indikator kemandirian keuangan menunjukkan bahwa nilai

skewness dan kurtosis lebih dari 0. Sedangkan, analisis indikator solvabilitas layanan menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Hal ini berdasarkan nilai skewness dan nilai kurtosis lebih dari 0. Hasil analisis indikator yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, menyebabkan nilai median digunakan sebagai nilai yang mencerminkan populasi. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis indikator kondisi keuangan pemerintah kota di Indonesia.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Indikator Kondisi Keuangan

Indikator		Solvabilitas Anggaran				Kemandirian Keuangan		Solvabilitas Layanan	
		Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D	Rasio A	Rasio B	Rasio D	Rasio F
N	Valid	180	180	180	180	180	180	180	180
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.19643	1.19643	2.12701	1.01800	.15943	.16514	4392011.04633	1095419.34378
Std. Error of Mean		.014326	.014326	.036850	.008759	.007009	.009038	160225.105368	47058.731594
Median		1.17746	1.17746	2.06079	1.00783	.14437	.14361	3986298.68589	937405.72546
Std. Deviation		.192201	.192201	.494399	.117521	.094031	.121251	2149645.363833	631359.136678
Variance		.037	.037	.244	.014	.009	.015	4620975190249.445	398614359467.302
Skewness		3.258	3.258	1.443	6.279	1.435	4.263	1.604	1.057
Std. Error of Skewness		.181	.181	.181	.181	.181	.181	.181	.181
Kurtosis		20.099	20.099	3.570	58.363	2.796	32.585	3.290	.851
Std. Error of Kurtosis		.360	.360	.360	.360	.360	.360	.360	.360
Range		1.746	1.746	3.215	1.421	.529	1.197	11012240.764	3329504.805
Minimum		.915	.915	1.357	.767	.033	.030	1669996.345	232570.708
Maximum		2.660	2.660	4.572	2.188	.561	1.228	12682237.109	3562075.513
Sum		215.358	215.358	382.862	183.240	28.698	29.725	790561988.339	197175481.881

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

1) SOLVABILITAS ANGGARAN

Nilai median solvabilitas anggaran pada rasio A, B, C, dan D adalah 1,177; 1,177; 2,060; 1,007. Nilai median yang berada di atas angka 1 mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2014-2019 pemerintah kota memiliki pendapatan yang cukup dalam membiayai belanja operasional. Kondisi keuangan pemerintah kota berdasarkan indikator solvabilitas anggaran dapat dikatakan baik. Pengelolaan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain yang sah harus tetap dioptimalisasi. Khususnya pengelolaan PAD

Nilai median solvabilitas anggaran menunjukkan adanya indikasi bahwa pemerintah kota selama tahun 2014 hingga tahun 2019 memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi belanja operasional. Pada rasio A, rasio B, dan rasio D mengalami tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bawa kapasitas total pendapatan dan pendapatan DAK yang dimiliki oleh pemerintah kota mengalami penurunan untuk menanggung jumlah belanja modal, belanja operasional dan total belanja. Krisis keuangan pemerintah kota dan kabupaten mengakibatkan jumlah belanja yang lebih besar (OECD, 2020). Peningkatan jumlah anggaran belanja harus sebanding dengan peningkatan jumlah pendapatan daerah, sehingga kapasitas fiskal pemerintah kota dapat meningkat agar terhindar dari krisis. Realokasi anggaran menjadi strategi utama banyak pemerintah di Asia dalam menghadapi krisis akibat pandemi. Alokasi anggaran prioritas diperuntukan untuk program kesehatan dan memberikan dana bantuan sosial

dimana pemerintah kota memiliki jenis pemungutan pajak dan retribusi yang sangat banyak dibandingkan pemerintah provinsi. Keleluasaan pemerintah kota untuk mengatur kapasitas fiskal agar dapat meningkatkan jumlah anggaran belanja. Pemerintah kota harus bisa mengelola sumber pendapatan daerahnya secara optimal. Pada masa pandemi covid 19 pembatasan aktifitas masyarakat berdampak kepada penurunan ekonomi daerah. Hal ini akan berimplikasi kepada kemungkinan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah menghadapi kehilangan besar atas pendapatan dan peningkatan belanja diakibatkan covid (Green & Loualiche, 2020). kepada masyarakat (ADB, 2021). Indikator solvabilitas anggaran menunjukkan bahwa pemerintah kota di Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menutupi belanja. Namun dengan terjadinya tren penurunan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesulitan keuangan dimasa depan. Pandemi covid 19 akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Pemerintah kota perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi defisit operasi dimasa depan. Defisit anggaran operasi merupakan permulaan terjadinya kesulitan keuangan daerah di masa datang. Pandemi akan berdampak kepada seluruh sektor ekonomi didaerah. Pemerintah kota perlu mengantisipasi kejadian ini agar tidak mengakibatkan krisis keuangan di daerah. Pandemi covid 19 membawa dampak meningkatkan biaya usaha untuk produksi, penurunan konsumsi masyarakat, meningkatnya resiko modal usaha akibat bencana, dan meningkatnya risiko perubahan

Tabel 2
Nilai Median

Indikator Solvabilitas Anggaran

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D
2019	1,10383	1,10383	2,19795	1,00378
2018	1,10022	1,10022	2,17175	1,00378
2017	1,14909	1,14909	2,15032	1,00966
2016	1,13078	1,13078	1,81373	0,97892
2015	1,19399	1,19399	1,88939	1,00522
2014	1,29011	1,29011	1,90745	1,03837

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

makroekonomi dunia akibat pandemi (Mckibbin & Fernando, 2020).

2) KEMANDIRIAN KEUANGAN

Nilai median kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia adalah 0,144 dan 0,143. Kemandirian pemerintah kota di Indonesia relatif masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari presentasi pendapatan daerah yang dapat membiayai belanja daerah. Presentasi kemandirian keuangan pemerintah kota berada

Kemandirian keuangan pemerintah kota tahun 2014-2019 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mengalami kondisi keuangan yang stabil dalam aspek kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi indikator PDRB (Nurbaida, 2019). PDRB daerah yang baik akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Nurbaida, 2019). Pengelolaan pajak daerah yang optimal juga menjadi indikator dalam

pada 14,4% dan 14,3%. Kondisi ini diartikan bahwa hanya 14,4% dari pendapatan pemerintah kota yang berada dibawah kendalinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih sangat bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari luar. Rendahnya kemandirian keuangan pemerintah kota berakibat kepada kemampuan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19. Kapasitas anggaran pemerintah daerah mempengaruhi kemampuan daerah dalam proses penanggulangan pandemi. berperan besar terhadap APBD daerah dan pemerintah daerah belum optimal dalam mengali dan mengembangkan potensi lokal (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Pandemi covid 19 akan membawa dampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan pajak dan retribusi akibat penurunan aktifitas ekonomi daerah. Krisis akibat pandemi berdampak kepada keuangan pemerintah daerah, yaitu meningkatnya belanja dan menurunnya

Tabel 3
Nilai Median
Indikator Kemandirian Keuangan

Tahun	Rasio A	Rasio B
2019	0,145499	0,150085
2018	0,147748	0,150085
2017	0,164028	0,170002
2016	0,132106	0,127384
2015	0,132272	0,128656
2014	0,125602	0,133730

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

meningkatkan PAD. PAD masih belum bisa

Kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia yang rendah disebabkan oleh konsekuensi kebijakan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang berpengaruh signifikan terhadap kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Republik Indonesia, 2002). Hal ini menyebabkan pemerintah kota hanya mengelola sumber pendapatan strategis yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagian besar wilayah kota tidak memiliki sumber daya alam

pendapatan (OECD, 2020).

yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah kota masih sangat bergantung kepada pendapatan pajak dan retribusi daerah. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap realisasi PAD dimasa pandemi. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penurunan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak negatif pada anggaran, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar tidak meningkatkan jumlah hutang (OECD, 2020). Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi tetapi inovasi ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku (Cipto, 2018). Kemampuan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentu bervariasi antar pemerintah daerah (Cipto, 2018).

3) SOLVABILITAS LAYANAN

Nilai median solvabilitas layanan untuk Rasio D 3.986.298,68 dan rasio F 937.405,7. Perhitungan rasio D menunjukkan bahwa total belanja yang dimiliki pemerintah kota untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebesar Rp3.986.298,68. Pada tahun 2019 kapasitas anggaran belanja yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik mencapai Rp3.986.298,68 untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada

masyarakat (per individu). Perhitungan rasio F menunjukkan bahwa kapasitas belanja modal yang digunakan oleh pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi setiap masyarakat mencapai Rp937.405,72. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota di Indonesia memiliki kapasitas belanja dan belanja modal yang cukup besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 4
Nilai Median
Indikator Solvabilitas Layanan

Tahun	Rasio D	Rasio F
2019	3.699.319	970.214
2018	3.734.556	970.214
2017	3.834.575	859.978
2016	4.364.380	1.007.598
2015	4.026.381	918.160
2014	3.893.114	878.103

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Solvabilitas layanan pemerintah kota tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kapasitas belanja. Kapasitas belanja yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp4.364.380. Sedangkan kapasitas belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp1.007.598. Pada tiga tahun setelahnya mengalami penurunan sehingga tahun 2019 menjadi kapasitas anggaran terendah selama 6 tahun pengamatan. Penurunan jumlah kapasitas belanja modal dan total belanja dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Anggaran tambahan pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh demografi karena berdampak kepada permintaan pelayanan publik dan respon pemerintah terhadap masyarakat (Lilly, Tetlow,

Davies, & Pope, 2020). Pandemi covid 19 akan berdampak kepada penambahan anggaran pemerintah daerah sebanyak 5%-10% untuk penyelenggaraan layanan publik (Norman, 2021).

Kapasitas APBD pemerintah kota dalam kategori baik untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah kota bertugas sebagai penyelenggara urusan umum pelayanan dasar di wilayah kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa “kewajiban utama pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial (Republik Indonesia, 2014).” Pandemi covid 19 meningkatkan jumlah permintaan masyarakat

terhadap fasilitas layanan kesehatan, sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan kepada bidang kesehatan akan meningkat. Kebutuhan fasilitas kesehatan tergantung pada jumlah kasus covid 19 yang terjadi, semakin banyak jumlah kasus maka kebutuhan fasilitas kesehatan akan meningkat. Pemerintah kota harus mampu menyediakan fasilitas publik pada saat kondisi tidak terduga. Fasilitas publik yang baik akan berimplikasi kepada penanggulangan pandemi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus dapat meningkatkan nilai rasio solvabilitas layanan dimasa yang akan datang. Semakin meningkatnya nilai rasio solvabilitas layanan maka berindikasi kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat menambah kemampuan daerah dalam penanggulangan kejadian tidak terduga seperti covid 19. Pada saat menghadapi pandemi covid 19 anggaran belanja pemerintah daerah meningkat. Peningkatan anggaran dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan *houselessness and sleeping service* (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Pemerintah kabupaten dan kota harus berfokus pada menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh dengan biaya yang murah (OECD, 2020).

B. INDEKS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA

1) INDEKS SOLVABILITAS ANGGARAN

Indeks dimensi solvabilitas anggaran tertinggi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah Kota Palu, Kota Balikpapan, Kota Bima, Kota Tarakan, dan Kota Pontianak. Indeks dimensi ini dapat diartikan bahwa peringkat terbaik solvabilitas anggaran pada pemerintah kota di Indonesia menyebar keseluruh wilayah. Krisis keuangan pemerintah kota dan kabupaten pada masa pandemi mengakibatkan jumlah belanja yang lebih besar (OECD, 2020). Pemerintah daerah masih mengandalkan DAU dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Negara bagian dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kepada anggaran, untuk menurunkan dampak fiskal dari pendapatan dan belanja untuk menahan resesi dan mempercepat perbaikan ekonomi (Auerbach,

Gale, Lutz, & Sheiner, 2020). Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk menahan tekanan fiskal yang diakibatkan oleh pandemi (Green & Loualiche, 2020). Indeks dimensi solvabilitas anggaran terendah dialami oleh pemerintah Kota Bima, Kota Gorontalo, Kota Ambon, Kota Tarakan, dan Kota Kupang. Pengaruh strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat krusial untuk meningkatkan solvabilitas anggaran sebuah daerah. Pemerintah daerah masih mengandalkan DAU dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak menggali secara optimal sumber pendapatan asli daerah. ketergantungan yang sangat tinggi kepada pendapatan dana transfer akan berdampak buruk kepada kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dimasa depan. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. sehingga bagi pemerintah kota yang memiliki solvabilitas anggaran yang rendah harus menerapkan strategi pengelolaan keuangan jangka pendek yang berorientasi kepada penanganan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadinya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan, pelayanan sosial, dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan masih relatif rendah (Nurbaida N. , 2019).

Hasil Perhitungan Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran

Tahun	Nama Daerah	Skor Tertinggi	Nama Daerah	Skor Terendah
2019	Kota Palu	1,00	Kota Bima	0,04
2018	Kota Balikpapan	0,84	Kota Bima	0,07
2017	Kota Bima	0,80	Kota Gorontalo	0,10
2016	Kota Tarakan	0,86	Kota Ambon	0,10
2015	Kota Pontianak	0,79	Kota Tarakan	0,02
2014	Kota Bima	0,98	Kota Kupang	0,04

Sumber: Hasil penelitian, 2021

INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN

Indeks dimensi kemandirian keuangan pemerintah Kota Denpasar menempati peringkat terbaik dalam hal kemandirian keuangan daerah selama tahun 2015 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar dapat

Tabel 5

adalah lokasi wisata yang terkenal di dunia, sehingga dapat menunjang tingkat pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Indikator kemandirian keuangan yang meningkat menjadi indikator pemerintah daerah dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru (Maizunati, 2017). Namun, terjadinya pandemi covid 19 dapat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah. Pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat covid 19. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan pajak, non pajak, fees, dan retribusi (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Pemerintah daerah mengalami kehilangan pendapatan dari pajak, penangguhan pembayaran pajak dari masyarakat, dan penurunan pajak properti selama pandemi (Green & Loualiche, 2020). Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang meningkat dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor potensial seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan perdagangan (Maizunati, 2017). Oleh Karena itu, diproyeksikan pemerintah Kota Denpasar

memanfaatkan seluruh potensi pendapatan daerah yang dimiliki untuk menunjang seluruh kegiatan operasional dan meningkatkan kapasitas anggarannya daerah. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi daerah. Bali

akan mengalami penurunan kemandirian keuangan akibat pandemi covid 19. Pemerintah daerah di Indonesia mengandalkan sektor jasa, pariwisata, dan perdagangan sebagai sumber pendapatan daerah. Pandemi covid 19 yang menyebabkan terhentinya aktifitas masyarakat dan penurunan ekonomi harus diantisipasi dengan cepat. Strategi penanggulangan kasus covid 19 yang tepat akan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Sebaliknya, indeks kemandirian keuangan terendah ditempati oleh pemerintah Kota Tual. Kota Tual adalah daerah pemekaran baru di Provinsi Maluku. Kota Tual memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Kota Tual memiliki potensi daerah yang sangat kaya dibidang sumber daya alam dan pariwisata, sehingga diproyeksikan akan memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat meningkatkan PAD (Hidat, Pratomo, & Harjito, 2007). Pandemi covid 19 sangat berdampak kepada sektor pariwisata, sehingga berpengaruh kepada tingkat pendapatan daerah Kota Tual.

Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran Terbaik

Tahun	Nama Daerah	Skor Tertinggi	Nama Daerah	Skor Terendah
2019	Kota Denpasar	1,00	Kota Tual	0,00
2018	Kota Denpasar	1,00	Kota Tual	0,00
2017	Kota Denpasar	1,00	Kota Tual	0,00
2016	Kota Denpasar	1,00	Kota Tual	0,00
2015	Kota Denpasar	1,00	Kota Tual	0,00
2014	Kota Bima	1,00	Kota Tual	0,00

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Kota Tual dapat melakukan pengelolaan anggaran yang lebih berorientasi kepada penanganan pandemi dan melakukan realokasi anggaran.

3) INDEKS SOLVABILITAS LAYANAN

Indeks solvabilitas layanan tertinggi adalah pemerintah Kota Ternate dan Kota Bontang. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kota tersebut dapat memenuhi segala pelayanan publik dengan optimal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berada di sana. Solvabilitas layanan yang terendah yaitu pemerintah Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, dan Kota Bima. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota tersebut masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Indeks solvabilitas layanan sangat bergantung dengan jumlah populasi penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin kecil kapasitas anggaran yang dapat dialokasikan untuk pelayanan publik. Namun, jumlah populasi penduduk yang besar juga memiliki potensi kepada penambahan atas PAD. Jumlah populasi penduduk yang besar berimplikasi kepada keuangan daerah yang lebih baik (Rusmin, Astawi, & Scully, 2014). Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan potensi penerimaan daerah (Rusmin, Astawi, & Scully, 2014). Semua bergantung kepada pemerintah daerah dalam mengelola segala sumber daya

Pemulihan kondisi keuangan dimasa pandemi tergantung kepada strategi pemerintah daerah penanggulangan kasus covid 19. **Tabel 6** yang dimiliki. Jumlah penduduk sebuah daerah tidak mempengaruhi level hutang di pemerintah daerah (Brusca, Rossi, & Aversano, 2015). Indikator solvabilitas layanan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan inflasi di daerah (Maizunati, 2017). Pandemi covid 19 akan meningkatkan jumlah permintaan masyarakat pada fasilitas kesehatan, sehingga pemerintah kota harus mengalokasikan anggaran belanja kepada penyelenggaraan kesehatan daerah. Pemerintah kota dengan indeks solvabilitas layanan terbaik diproyeksikan memiliki kapasitas keuangan yang baik dalam menghadapi pandemi. sedangkan, bagi pemerintah kota dengan indeks terendah diproyeksikan akan mengalami kesulitan keuangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam kondisi pandemi.

Pandemi covid 19 akan meningkatkan permintaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan. Penangan pandemi covid 19 di daerah sebagian besar dilakukan dengan strategi jangka pendek. Strategi ini dilaksanakan dengan melakukan realokasi anggaran belanja. Pemerintah kabupaten dan kota berfokus pada menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh dengan biaya yang murah (OECD, 2020).

Tabel 7

Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran Terbaik


Tahun	Nama Daerah	Skor Tertinggi	Nama Daerah	Skor Terendah
2019	Kota Ternate	1,00	Kota Denpasar	0,02
2018	Kota Ternate	1,00	Kota Denpasar	0,01
2017	Kota Ternate	1,00	Kota Banjarmasin	0,01
2016	Kota Ternate	0,94	Kota Denpasar	0,01
2015	Kota Bontang	0,90	Kota Denpasar	0,01
2014	Kota Ternate	0,89	Kota Bima	0,01


Sumber: Hasil penelitian, 2021

Tabel 8
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan
Pemerintah Kota di Indonesia
Tahun 2014-2019

Nama Daerah	2019			2018			2017			2016			2015			2014		
	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan
Kota Pontianak	0,36	0,57	0,13	0,68	0,57	0,12	0,50	0,58	0,10	0,62	0,62	0,07	0,79	0,46	0,09	0,19	0,26	0,11
Kota Singkawang	0,27	0,29	0,26	0,56	0,29	0,24	0,46	0,25	0,19	0,45	0,24	0,22	0,55	0,23	0,18	0,14	0,12	0,20
Kota Palangkaraya	0,27	0,26	0,22	0,54	0,26	0,21	0,21	0,20	0,23	0,43	0,18	0,27	0,46	0,20	0,19	0,07	0,07	0,20
Kota Banjarmasin	0,33	0,37	0,05	0,69	0,37	0,03	0,47	0,41	0,01	0,48	0,33	0,05	0,49	0,30	0,06	0,16	0,16	0,06
Kota Banjarbaru	0,28	0,45	0,30	0,57	0,45	0,28	0,52	0,41	0,31	0,56	0,31	0,47	0,66	0,28	0,41	0,22	0,15	0,29
Kota Samarinda	0,37	0,39	0,22	0,77	0,39	0,20	0,45	0,40	0,16	0,83	0,34	0,15	0,65	0,25	0,29	0,22	0,15	0,39
Kota Bontang	0,42	0,32	0,62	0,79	0,32	0,59	0,66	0,27	0,39	0,63	0,29	0,47	0,42	0,15	0,90	0,41	0,10	0,87
Kota Balikpapan	0,45	0,64	0,23	0,84	0,64	0,22	0,72	0,64	0,14	0,69	0,62	0,19	0,53	0,48	0,37	0,37	0,36	0,41
Kota Tarakan	0,18	0,12	0,24	0,37	0,12	0,22	0,21	0,09	0,15	0,86	0,08	0,22	0,02	0,16	0,13	0,61	0,02	0,53
Kota Denpasar	0,21	1,00	0,02	0,39	1,00	0,01	0,34	1,00	0,01	0,59	1,00	0,01	0,48	1,00	0,01	0,14	0,51	0,02
Kota Bima	0,04	0,06	0,05	0,07	0,06	0,06	0,80	0,03	0,07	0,31	0,02	0,05	0,37	0,01	0,04	0,98	1,00	0,01
Kota Mataram	0,15	0,53	0,14	0,31	0,53	0,13	0,22	0,50	0,15	0,53	0,46	0,14	0,43	0,38	0,11	0,11	0,21	0,10
Kota Kupang	0,10	0,28	0,14	0,23	0,28	0,12	0,32	0,33	0,14	0,16	0,28	0,11	0,37	0,27	0,06	0,04	0,11	0,05
Kota Gorontalo	0,11	0,49	0,16	0,24	0,49	0,15	0,10	0,38	0,23	0,12	0,37	0,28	0,30	0,31	0,22	0,05	0,18	0,15
Kota Makassar	0,20	0,75	0,08	0,36	0,75	0,07	0,40	0,77	0,05	0,62	0,65	0,05	0,45	0,60	0,06	0,10	0,33	0,03
Kota Palopo	0,07	0,27	0,44	0,17	0,27	0,44	0,22	0,29	0,51	0,30	0,25	0,62	0,36	0,20	0,25	0,09	0,11	0,22
Kota Pare-Pare	0,19	0,33	0,32	0,38	0,33	0,32	0,12	0,23	0,66	0,24	0,28	0,70	0,52	0,26	0,41	0,18	0,17	0,28
Kota Palu	1,00	0,27	0,22	0,48	0,44	0,11	0,31	0,38	0,17	0,24	0,43	0,21	0,35	0,39	0,18	0,07	0,19	0,22
Kota Bau-Bau	0,25	0,15	0,32	0,50	0,15	0,31	0,14	0,17	0,52	0,52	0,12	0,57	0,43	0,09	0,44	0,13	0,06	0,28
Kota Kendari	0,16	0,27	0,28	0,36	0,27	0,27	0,31	0,32	0,22	0,38	0,24	0,39	0,53	0,28	0,24	0,10	0,17	0,25
Kota Bitung	0,18	0,19	0,38	0,35	0,19	0,37	0,36	0,22	0,24	0,60	0,17	0,26	0,39	0,27	0,20	0,12	0,10	0,24
Kota Mobagu	0,16	0,14	0,46	0,30	0,14	0,45	0,30	0,12	0,49	0,19	0,07	0,56	0,54	0,05	0,31	0,10	0,02	0,35
Kota Manado	0,12	0,51	0,18	0,22	0,51	0,17	0,43	0,41	0,23	0,24	0,43	0,27	0,72	0,36	0,17	0,07	0,22	0,15
Kota Tomohon	0,06	0,08	0,41	0,18	0,05	0,59	0,20	0,02	0,58	0,34	0,02	0,47	0,39	0,02	0,37	0,12	0,00	0,47
Kota Ambon	0,06	0,25	0,04	0,11	0,25	0,03	0,27	0,18	0,04	0,10	0,20	0,04	0,35	0,17	0,05	0,06	0,09	0,02
Kota Tual	0,23	0,00	0,63	0,34	0,00	0,63	0,76	0,00	0,74	0,72	0,00	0,76	0,68	0,00	0,51	0,19	0,00	0,44
Kota Ternate	0,21	0,18	1,00	0,40	0,18	1,00	0,12	0,12	1,00	0,48	0,12	0,94	0,37	0,09	0,79	0,08	0,05	0,89
Kota Tidore	0,18	0,09	0,58	0,33	0,09	0,58	0,26	0,05	0,40	0,42	0,04	0,61	0,51	0,02	0,52	0,13	0,01	0,57
Kota Jayapura	0,21	0,39	0,21	0,38	0,39	0,20	0,17	0,21	0,18	0,16	0,23	0,25	0,51	0,22	0,25	0,18	0,13	0,27
Kota Sorong	0,25	0,15	0,36	0,43	0,15	0,35	0,48	0,27	0,31	0,48	0,16	0,31	0,56	0,15	0,26	0,21	0,11	0,25

Sumber: Hasil penelitian, 2021 **Keterangan:**

 Indeks dimensi tertinggi

 Indeks dimensi terendah

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan kondisi keuangan pemerintah kota di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan dalam membiayai belanja daerah selama tahun 2014-2019 karena memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi belanja operasional.

Solvabilitas anggaran pemerintah kota mengalami tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas total pendapatan dan pendapatan dak yang dimiliki oleh pemerintah kota mengalami penurunan untuk menanggung jumlah belanja modal, belanja operasional dan total belanja. Diproyeksikan pemerintah kota di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk menyelenggarakan kegiatan operasional dimasa pandemi covid 19.

- b. Kemandirian keuangan menunjukan bahwa hanya 14,4% dari pendapatan pemerintah kota yang berada dibawah kendalinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah kota masih bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari luar. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota diproyeksikan akan semakin menurun pada saat pandemi terjadi. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah secara signifikan akibat pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak kepada ekonomi daerah.

- c. Solvabilitas layanan pemerintah kota memiliki kapasitas anggaran total belanja sebesar Rp3.986.298,68 untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kapasitas belanja modal yang digunakan oleh pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi setiap masyarakat mencapai Rp937.405,72. Kapasitas belanja dan belanja modal untuk menyelenggarakan pelayanan publik mengalami tren

penurunan Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 menjadi kapasitas anggaran terendah selama 6 tahun pengamatan. Penurunan kapasitas anggaran pada solvabilitas layanan diproyeksikan akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi pandemi. Penyelenggaraan layanan publik akan sangat penting bagi keberhasilan daerah dalam penanggulangan kasus covid 19. Kapasitas anggaran daerah yang dialokasikan untuk pelayanan publik harus ditingkatkan pada masa pandemi.

- d. Indeks solvabilitas anggaran tertinggi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah Palu, Balikpapan, Bima, Tarakan, dan Pontianak, sedangkan indeks terendah adalah pemerintah kota Bima, Gorontalo, Ambon, Tarakan, dan Kupang. Indeks kemandirian keuangan tertinggi adalah Kota Denpasar. Indeks kemandirian keuangan terendah adalah Kota Tual. Indeks solvabilitas layanan Kota Ternate dan Kota Bontang merupakan indeks tertinggi, sedangkan indeks terendah adalah Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, dan Kota Bima. Pemerintah kota dengan indeks kondisi keuangan tertinggi diproyeksikan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi pandemi. Sedangkan, pemerintah kota dengan indeks kondisi keuangan terendah diproyeksikan memiliki kemampuan yang buruk dalam menghadapi pandemi.

REFERENSI

- ADB. (2021, February). Addressing the Covid 19 Crisis: Lessons from Support for Public Financial Management. *Covid Series-2*.
- American Hospital Association. (2020). *Hospitals and Health Systems Face Unprecedented Financial Pressures Due to Covid 19*. USA: American Hospital Association.
- Auerbach, A., Gale, B., Lutz, B., & Sheiner, L.

- (2020). Fiscal Effects of Covid 19. *BPEA Conference Drafts* (pp. 1-60). USA: Brookings Papers on Economic Activity.
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the Financial Condition of Local Government: A Comparative Study Between Italy and Spain. *JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT*, 13, 161-184.
- Cipto, P. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59246>
- Green, D., & Loualiche, E. (2020). *State and Local Government Employment in the Covid 19 Crisis*. Harvard University. Boston: Harvard Business School.
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of Covid 19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of research and review*, 7(5), 75-80.
- Hidayat, P., Pratomo, W. A., & Harjito, D. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 213-222.
- Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Data Sebaran*. Jakarta: Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved April 10, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Lilly, A., Tetlow, G., Davies, O., & Pope, T. (2020). *The cost of Covid 19 The Impact of Coronavirus on the UK's public finance*. Institute for government. UK: Institute for government.
- Maizunati, N. A. (2017, April 2). Financial Condition Analysis of Magelang City Government in The city Cluster in JavaBali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2).
- Mckibbin, W., & Fernando, R. (2020). *The Global Macroeconomic Impact of Covid 19 Seven Scenarios*. Australia: Brookings.
- Ministry of Housing, Communities and Local Government. (2021). *Local Government finance in the pandemic*. The comptroleer and auditor general. UK: National Audit Office.
- Norman, J. (2021). *Budget 2021 Protecting The Jobs and Livelihoods of The British People*. UK: The House of Commons.
- Nugroho, H., & Muhyiddin. (2021, April 1). Indonesia Development Update A year of Covid 19: A long road to recovery and acceleration of Indonesia's development. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1-20. doi:10.36574/jpp.v5i1
- Nurbaida, N. (2019). Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2008-2018. *Jurnal soso2*, 7(1), 25-33.
- OECD. (2020). *The Impact of the Covid 19 crisis on regional and local governments: main findings from the joint CoR-OECD survey*. OECD Regional Development Papers.
- Republik Indonesia. (2002, Agustus 11). Undang-Undang Dasar 1945. *UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta, Jakarta, Indonesia. Retrieved 2021, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi

- Daerah. Jakarta, Jakarta, Indonesia. Retrieved Oktober 2021, from <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29, 142-164.
- Rusmin, R., Astawi, E. W., & Scully, G. (2014). Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 8(2).
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019, Juni). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 02(03), 343-357.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28 ed., p. 81). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS* (1 ed.). (Mona, Ed.) Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-51.
- The PRAKARSA, & TAFJA. (2020). *Towards sustainable tax policies in the ASEAN region: The case of corporate tax incentives*. Hanoi, Vietnam: VEPR, Oxfam in Vietnam, The PRAKARSA, & TAFJA.
- Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniari, Mediyanti, S., Agustiana, Azlina, & Andina, A. (2019). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerinath Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* (pp. 113-116). SAINTEKS. Retrieved from <https://seminar-id.com/seminassainteks2019.html>
- VEPR, Oxfam in Vietnam, The PRAKARSA, & TAFJA. (2020). *Towards sustainable tax policies in the ASEAN region: The case of corporate tax incentives*. Hanoi, Vietnam: VEPR, Oxfam in Vietnam, The PRAKARSA, & TAFJA.